

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Relasi antara ulama dan politik telah menjadi bagian integral dari sejarah dan perkembangan banyak negara, terutama di dunia Islam. Ulama, sebagai pemimpin spiritual dan otoritas agama dalam masyarakat Muslim, sering kali memiliki peran yang signifikan dalam ranah politik. Fenomena ini tidak hanya terbatas pada satu wilayah geografis, tetapi juga terjadi di berbagai negara dengan populasi muslim yang signifikan. Sejarah mencatat banyak contoh di mana ulama terlibat dalam politik, baik sebagai pemimpin langsung maupun sebagai pengaruh moral bagi penguasa politik. Peran ulama dalam politik dapat bervariasi, mulai dari memberikan fatwa (pendapat hukum agama) terkait kebijakan politik hingga menjadi pemimpin politik aktif yang memegang jabatan pemerintahan.¹

Dalam beberapa konteks, hubungan antara ulama dan politik dapat menjadi kompleks. Pada satu sisi, kehadiran ulama dalam politik dapat memberikan otoritas moral dan pandangan yang berlandaskan nilai-nilai agama. Namun, di sisi lain, campur tangan ulama dalam urusan politik juga dapat menimbulkan kontroversi dan memicu konflik kepentingan antara kekuasaan politik dan otoritas keagamaan.²

¹Sabara Nuruddin "Islam dalam Lanskap Ideologi dan Politik NKRI." *Jurnal Pappasang*. Vol. I, No. 1 tahun 2013, 1.

²Lihat Malik bin Nabi, *Membangun Dunia Baru Islam* terj. Afif Muhammad dan Abdul Adhiem (Cet, II; Bandung : Mizan. 1995), 24.

Pada saat ini, khususnya pada tahun 2024, bertepatan dengan pesta demokrasi seluruh Indonesia. Di mana masyarakat Indonesia yang sudah memenuhi syarat diminta untuk memilih calon pemimpin yang akan memimpin negeri ini, termasuk calon presiden dan wakil, calon legislatif tingkat daerah sampai nasional dan wakil daerah. Di Kabupaten Banjar khususnya ketika pemilu sering terlihat para pemuka agama mencalonkan diri dan ikut serta dalam kontestasi politik, baik itu dari fraksi partai atau independen. Hal ini menjadi suatu fenomena tersendiri di Kabupaten Banjar. Namun jika kita tinjau kebelakang ada banyak tokoh agama, atau tuan guru yang mencalonkan diri, baik itu yang menjadi aktor atau yang berada di balik layar. Akhirnya peran ulama khususnya di Kabupaten Banjar menjadi kompleks bukan hanya sebagai pembina atau pembimbing umat, namun juga sebagai pejabat politik.

Kedudukan ulama di masyarakat Banjar sangatlah tinggi. Melalui persepsi masyarakat terhadap beberapa kegiatan sosial dan keagamaan, disadari bahwa seseorang yang berlebel atau dianggap ulama diperlakukan dengan hormat. Kemunculannya disanjung, dihormati, tangannya dijabat, juga tangannya dicium. Di berbagai acara sosial dan keagamaan lainnya, para ulama diundang dan diminta duduk di tempat khusus atau di depan. Dalam acara-acara perayaan besar Islam, dalam upacara pernikahan, khususnya dalam acara majelis agama, pernikahan, ucapan selamat dan selalu diperlakukan dengan hormat. Di acara formal pemerintahan juga ulama di undang, dipersilakan duduk berdampingan dengan para pejabat pemerintah ketika menyambut hari-hari besar nasional atau acara institusi pemerintah. Otoritas pemerintah juga secara konsisten menyambut para ulama, baik

untuk sekadar memimpin dan menyelesaikan salat hajat, atau untuk membacakan doa.

Penghormatan, penghargaan dan kecintaan kepada ulama tidak hanya pada saat mereka masih hidup, tetapi juga ketika mereka wafat. Ada banyak makam ulama yang ramai dikunjungi oleh penziarah di Kalimantan Selatan sampai saat ini, terlebih lagi seperti acara haul yang sangat banyak diikuti oleh jemaah yang banyak, baik dari lokal sampai internasional, karena mereka dipercayai mempunyai karomah dan ketika mengikutinya akan mendapatkan berkah.³

Peran ulama dalam politik tetap menjadi topik yang relevan dan menarik untuk diteliti lebih lanjut. Penelitian tentang peran ulama khususnya di Kabupaten Banjar dalam kontestasi politik tahun 2024 yang kemudian dianalisis menggunakan wacana keagamaan Michel Foucault menjadi lebih menarik, di mana penelitian ini akan mengungkapkan makna-makna atau maksud yang terselubung, yang tidak dirasakan oleh masyarakat menggunakan analisis teori Michel Foucault.

Dalam konteks politik Indonesia, agama dan politik memiliki hubungan yang erat dan kompleks. Ulama, sebagai tokoh agama, sering kali memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk opini dan sikap politik masyarakat. Di Kabupaten Banjar, ulama bukan hanya sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai aktor politik yang potensial. Fenomena ini semakin terlihat menjelang pemilu 2024, di mana sejumlah ulama mencalonkan diri sebagai kontestan politik.

³Ahdi Makmur, "Peranan Ulama Dalam Membina Masyarakat Banjar Di Kalimantan Selatan". *Jurnal Miqot Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Banjarmasin*, Vol.XXXVI, No.01, 2012, 185-186.

Peran ulama dalam politik bukanlah hal yang baru di Indonesia, namun dinamika politik lokal di Kabupaten Banjar memberikan konteks yang unik. Ulama di daerah ini seringkali memiliki pengaruh yang kuat dalam komunitasnya, yang didasarkan pada kepercayaan dan penghormatan masyarakat terhadap mereka. Mengingat pentingnya peran ulama, memahami bagaimana mereka berinteraksi dalam arena politik menjadi sangat relevan.⁴

Pendekatan analisis wacana Michel Foucault memberikan kerangka yang tepat untuk memahami dinamika ini. Foucault menekankan bagaimana wacana membentuk pengetahuan dan kekuasaan dalam masyarakat. Dengan menganalisis wacana keagamaan yang digunakan oleh ulama dalam konteks politik, kita dapat memahami bagaimana kekuasaan dan pengaruh mereka terbentuk dan berfungsi.⁵

Alasan Objektif peneliti Mengangkat Judul Ini

1. Signifikansi Akademis dan Empiris

Menggunakan pendekatan analisis wacana Foucault dalam konteks politik lokal di Kabupaten Banjar belum banyak dilakukan. Penelitian ini memberikan kontribusi akademis yang signifikan dengan mengisi celah dalam literatur dan menyediakan data empiris yang baru.

2. Relevansi Sosial-Politik

Dengan pemilu 2024 yang semakin dekat, memahami peran ulama dalam politik menjadi sangat relevan. Penelitian ini membantu memahami dinamika politik lokal yang spesifik, yang dapat memiliki implikasi lebih

⁴Michel Foucault, *Wacana Kuasa / Pengetahuan* (Yogyakarta: Narasi Pustaka Promethea, 2017), 150-151.

⁵Haryatmoko, *Membongkar Rezim Kepastian: Pemikiran Kritis Post-Strukturalis*, Cet.8 (Yogyakarta: PT Kanisius 2022), 10-11.

luas bagi politik nasional.

3. Kompleksitas Hubungan Agama dan Politik

Hubungan antara agama dan politik di Indonesia sangat kompleks dan dinamis. Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai bagaimana wacana keagamaan digunakan dalam politik, yang penting untuk pengembangan teori sosial dan politik.

Dan alasan Subjektif peneliti Mengangkat Judul Ini

1. Ketertarikan Pribadi

Ketertarikan peneliti pada peran agama dalam politik dan bagaimana wacana keagamaan dibentuk dan digunakan menjadi motivasi utama dalam memilih topik ini. Dengan latar belakang dan minat yang kuat dalam studi agama dan politik, penelitian ini menjadi lebih bermakna dan mendalam.

2. Konteks Lokal

Peneliti memiliki kedekatan dengan Kabupaten Banjar, baik secara geografis maupun kultural. Kedekatan ini memberikan akses yang lebih baik terhadap data dan narasumber, serta pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks lokal.

3. Kepedulian terhadap Dinamika Sosial

Peneliti memiliki kepedulian terhadap dampak sosial dari interaksi antara agama dan politik. Dengan meneliti peran ulama dalam politik, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan membantu dalam pengambilan

keputusan yang lebih baik.

Penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademis yang signifikan tetapi juga memiliki implikasi praktis dan sosial yang luas. Dengan memahami bagaimana ulama sebagai kontestan politik menggunakan wacana keagamaan dalam konteks pemilu 2024 di Kabupaten Banjar, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang hubungan kompleks antara agama dan politik di Indonesia. Alasan objektif dan subjektif yang mendasari pemilihan judul ini memperkuat relevansi dan pentingnya penelitian ini.⁶

Berangkat dari ketertarikan dan minat peneliti terhadap ulama dan politik menjadi fondasi yang sangat kuat dan fundamen untuk melakukan riset ini. Di tambah lagi filosofi keilmuan uin antasari yaitu berbasis lokal dan berwawasan global, misi dari Fakultas Ushuluddin dan Humaniora poin kedua, yaitu mengembangkan penelitian ilmu-ilmu keushuluddinan dan humaniora yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Menjadi daya dobrak dan amunisi tersendiri bagi peneliti selaku mahasiswa FUH UIN Antasari.⁷

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

⁶Hutagalung, Daniel, "Hegemoni, kekuasaan dan ideologi," *Jurnal Pemikiran Sosial, Politik Dan Hak Asasi Manusia*, No.12, Oktober-Desember 2004.

⁷Siregar, Mangihut. "Kritik Terhadap Teori Kekuasaan-Pengetahuan Foucault," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya*, 2021.

1. Apa saja wacana keagamaan yang digunakan oleh ulama sebagai kontestan politik di kabupaten Banjar tahun 2024?
2. Bagaimana analisis wacana keagamaan perspektif Michel Foucault?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apa saja wacana yang digunakan oleh ulama sebagai kontestan politik di Kabupaten Banjar pada tahun 2024
- b. Untuk mengetahui bagaimana analisis wacana Michel Foucault terhadap wacana yang dikonstruksi oleh ulama

2. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa signifikansi penting :

a. Signifikansi Akademis

1) Pengembangan Teori Sosial dan Politik

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori-teori sosial dan politik, khususnya yang berkaitan dengan peran agama dan tokoh agama dalam arena politik. Dengan menggunakan analisis wacana Michel Foucault, penelitian ini menambah pemahaman tentang bagaimana wacana keagamaan digunakan dan dimanipulasi dalam konteks politik lokal.

2) Studi Interdisipliner

Pendekatan interdisipliner yang menggabungkan studi agama, politik, dan teori wacana memungkinkan pengembangan perspektif

baru dalam studi ilmu sosial. Hal ini memperkaya literatur akademis dengan menyediakan analisis yang lebih mendalam mengenai hubungan antara kekuasaan, wacana, dan identitas keagamaan.

3) Referensi Empiris

Studi ini memberikan data empiris yang berharga mengenai dinamika politik di Kabupaten Banjar, khususnya dalam konteks pemilu 2024. Data ini dapat digunakan sebagai referensi oleh peneliti lain yang tertarik pada studi politik lokal dan peran ulama dalam politik.

b. Signifikansi Praktis

1) Pemahaman Publik

Hasil penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai peran dan pengaruh ulama dalam politik. Dengan memahami bagaimana wacana keagamaan dibentuk dan digunakan, masyarakat dapat menjadi lebih kritis terhadap informasi yang mereka terima dan lebih sadar akan dinamika politik di sekitar mereka.

2) Kebijakan dan Strategi Politik

Temuan penelitian ini dapat digunakan oleh pembuat kebijakan dan aktor politik untuk merancang strategi yang lebih efektif dan etis dalam kampanye politik. Pemahaman tentang bagaimana wacana keagamaan dapat mempengaruhi opini publik dan pilihan politik dapat membantu dalam menyusun pesan kampanye yang lebih tepat dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat.

3) Pengembangan Pendidikan Politik

Penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan program pendidikan politik yang lebih komprehensif, dengan menekankan pentingnya kritisisme terhadap wacana keagamaan dalam politik. Hal ini penting untuk membekali masyarakat, terutama pemilih muda, dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara aktif dan bijaksana dalam proses demokrasi.

c. Signifikansi Sosial

1) Peran Ulama dalam Masyarakat

Dengan mengeksplorasi peran ulama sebagai kontestan politik, penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana ulama dilihat dan diperlakukan dalam konteks yang berbeda-beda oleh masyarakat. Hal ini dapat membantu dalam memahami dan mengatasi potensi konflik atau kesalahpahaman yang mungkin timbul terkait peran ulama di arena politik.

2) Dialog Antar-Komunitas

Temuan penelitian ini dapat mendorong dialog antar-komunitas tentang peran agama dan tokoh agama dalam politik. Dialog semacam ini penting untuk mempromosikan toleransi, penghormatan, dan kerja sama di antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

Secara keseluruhan, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademis yang signifikan, tetapi juga memiliki implikasi praktis dan sosial yang luas, yang dapat membantu dalam membangun masyarakat yang lebih sadar dan kritis terhadap peran agama dalam politik.

D. Batasan Penelitian

1. Penelitian ini terbatas pada Kabupaten Banjar khususnya Martapura, sehingga generalisasi hasil perlu dilakukan dengan hati-hati ketika diterapkan pada daerah lain.
2. Waktu penelitian terfokus pada periode kontestasi politik menuju tahun 2024, dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang akurat dan kontekstual.
3. Penelitian juga bukan membahas hasil dari pemilihan umum (pemilu), tetapi penelitian ini berbicara bagaimana ulama menghasilkan kuasa, menjalankan dan menggunakan kuasa dalam hubungannya dengan masyarakat, sesuai dengan teori Michel Foucault.
4. Subjek penelitian utamanya adalah ulama yang secara aktif terlibat dalam kegiatan politik lokal, untuk mendapatkan perspektif yang relevan.
5. Analisis pemikiran Michel Foucault menjadi landasan utama dalam memahami dinamika kekuasaan dalam konteks ini, memastikan konsistensi dan kerangka analitis yang kuat dalam penelitian.

E. Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini akan mencakup beberapa konsep penting, antara lain :

Pertama, *Habib dalam Peta Politik di Indonesia*. Mawardi dan Agus Permana, UIN Sunan Gunung Djati, tahun 2022.⁸ Eksplorasi ini memiliki dua

⁸Mawardi & Agus Permana, "Habib dalam Peta Politik di Indonesia," *Jurnal UIN Sunan Gunung Djati*, tahun 2022.

sasaran, yaitu pertama untuk mengetahui peran politik Habaib dalam tantangan politik Indonesia dan untuk mengungkap eksklusi sosial politik Habaib di Indonesia. Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik eksplorasi autentik dengan tahapan kerja pengumpulan informasi (heuristik), konfirmasi (analisis), penerjemahan (pemahaman), dan penulisan (historiografi). Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa meskipun masih diperlukan bukti tambahan, para habaib di nusantara sudah mulai menunjukkan kiprahnya tidak hanya dalam kerangka Islamisasi dan penyebaran Islam tetapi juga memasuki ranah politik. Pada masa provinsi, ada beberapa habaib yang menjadi mesin pembangunan dan, yang mengejutkan, mendirikan Partai Timur Tengah Indonesia (PAI). Pada masa kebebasan, kontribusinya di bidang sosial dan politik mulai dari latihan di perkumpulan persahabatan, pembangunan sosial, hingga aktivisme di kelompok ideologi, menjadi anggota parlemen baik di DPD maupun DPR, hingga menduduki jabatan politik seperti pendeta atau kepala daerah.

Kedua, *Ulama dan Politik di Indonesia dalam Sudut Pandang Sosiologi*, sebuah jurnal dari ilmu sosial dan pendidikan, Universitas Sriwijaya tahun 2021, oleh Randi dkk.⁹ Jurnal ini yang memberi makna terhadap kontribusi ulama dalam dunia politik. Hal ini berarti memandang dan memperlakukan setiap orang yang terlibat dengan permasalahan legislatif sebagai individu dan penduduk yang setara serta mengambil pilihan secara wajar. Islam bukan sekadar agama yang mengarahkan hubungan manusia dengan Yang Mulia. Islam adalah agama yang

⁹Randi dkk, "Ulama dan Politik di Indonesia dalam Sudut Pandang Sosiologi," *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Universitas Sriwijaya*, tahun 2021.

ideal dan lengkap yang menjadi pedoman dalam seluruh aspek kehidupan manusia termasuk dalam permasalahan perundang-undangan dan kehidupan bernegara. Agama Islam sangat lengkap, juga memuat sistem pemerintahan dan politik. Karena tuntutan pelajaran Islam juga merupakan isu yang didorong oleh kebijakan, maka seluruh umat Islam, baik tokoh agama maupun masyarakat secara keseluruhan, memiliki keistimewaan dan komitmen dalam kehidupan politik. Dengan banyaknya hal yang mengasimilasikan tugas ulama dalam urusan pemerintahan, terdapat pihak-pihak yang memperbolehkan lewatnya ulama. Meski begitu, ada juga di antara mereka yang tidak mendukung masuknya ulama ke dalam isu-isu pemerintahan dunia. Sekali lagi, bagaimanapun juga, ulama tetaplah ulama, dia adalah seorang penolong, pemberi pencerahan bagi umatnya dengan tujuan mendasar untuk mendampingi beberapa orang yang tidak pantas dan mendorong jalan yang benar sesuai pelajaran agamanya. Jika mereka bisa bersikap netral dalam memandang agama lain, mungkin para ulama bisa menjadi pelopor yang baik bagi masyarakat. Oleh karena itu, sekali lagi, Indonesia sendiri adalah negara yang kaya, kaya akan aset-aset berpengaruh, namun juga berbeda kebangsaan, ras, masyarakat dan agama. Oleh karena itu, dengan asumsi dia bisa membedakan segala sesuatu dengan wawasan tanpa rasa hina dan keselarasan perasaan maka politik adalah sesuatu yang sangat hebat bagi ulama dan budaya Indonesia sebenarnya. Posisi ilmu pengetahuan dan ulama bahkan sangat buruk bagi umat Islam di seluruh umat manusia. Tugas mereka adalah melindungi individu dari bahaya akibat pemberontakan dan pemusnahan planet ini.

Ketiga, *Keterlibatan Ulama dan Pemenangan Caleg DPRD Provinsi Dapil Vi Tahun 2019 (Studi Kasus Desa Sukacinta Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim)*, skripsi oleh Afif tahun 2021.¹⁰ Permasalahan yang dititik beratkan dalam kajian ini adalah Pertama, bagaimana keterkaitan antara ulama dengan pejabat publik dan tokoh politik serta bagaimana kontribusi ulama dalam memenangkan Calon Diskresi Daerah VI DPRD Tahun 2019 di Kota Sukacinta, kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim. Penelusuran ini bertujuan untuk mengetahui kolaborasi ulama dengan pemerintah dan tokoh politik serta mengetahui jenis perkumpulan ulama dalam memenangkan Pemilu DPRD Daerah Konstituen VI di Kota Sukacinta, Sungai Rotan. Daerah, Rezim Muara Enim. Eksplorasi ini menggunakan strategi subjektif di mana konsekuensi-konsekuensi persepsi dan sedikit informasi yang berkaitan dengan pemeriksaan dikumpulkan untuk menguraikan konsentrasinya sedetail mungkin, sehingga konsekuensi-konsekuensi dari eksplorasi tersebut dengan jelas menunjukkan adanya keterkaitan antara ulama dan pemerintah. Masalah umumnya tidak disebabkan oleh proses pemikiran moneter, ketergantungan, atau sebagainya. Lebih dari itu, mereka juga berdiri sebagai dua substansi yang mampu membentuk kontribusi dan peran pembantu dalam menjalankan nilai-nilai kemanusiaan Pancasila. Dengan demikian, tidak bijak lagi jika isu-isu keulamaan dan pemerintahan hanya ditemukan secara bias dan menghambat potensinya yang dapat membawa perubahan besar bagi kemaslahatan individu.

¹⁰Afip, "Keterlibatan Ulama dan Pemenangan Caleg DPRD Provinsi Dapil VI Tahun 2019 (Studi Kasus Desa Sukacinta Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim)," *Skripsi* (Palembang: Fak Adab & Humaniora UIN Raden Fatah Palembang tahun 2021).

Keempat, *Ulama dan Politik (Studi Peran Ulama dalam Kontestasi Politik di Kabupaten Polewali Mandar)*, Sebuah Tesis Dari Said Usman 2020.¹¹ Tesis ini mengkaji persoalan ulama dan perundang-undangan, khususnya mengenai peran ulama dalam kontestasi politik pada Pemerintahan Polewali Mandar (Polman). Kekhawatiran utama yang mendesak terpusat pada kiprah ulama dalam kontestasi politik, pandangan masyarakat setempat (tokoh) terhadap kiprahnya, dan dampak kiprah ulama dalam kontestasi politik di Polman. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan subjektif. Metodologi mendasar dalam eksplorasi ini adalah cara pandang politik Islam dengan melihat visi, posisi, pekerjaan, kemajuan dan dampak ulama dalam kontestasi politik di Polman. Metodologi opsional yang digunakan dalam ujian ini adalah pendekatan ilmu politik manusia, metodologi yang dapat diverifikasi dan metodologi serupa. Strategi cerdas yang digunakan adalah strategi yang sangat mendasar. Kerja sama politik para ulama masih sangat minim dalam kontestasi politik di Polman, masih belum banyak ulama yang terjun langsung dalam isu-isu legislasi yang ada, hanya ada dua nama ulama dari Polman yang efektif terlibat dalam isu-isu legislasi yang masuk akal, tepatnya AGH .Syibli Shahabuddin dan H. Zainal Abidin, LC. Pentingnya kedudukan ulama dalam desain sosio-sosial budaya Polman tidak berarti bahwa ulama yang terkait dengan permasalahan pemerintahan yang membumi mendapat bantuan besar dari masyarakat. Visi politik ulama masih belum tertanam kuat di mata masyarakat, karena metodologi politik dan korespondensi yang dilakukan ulama masih sangat

¹¹Said Usman, "Ulama dan Politik (Study Peran Ulama dalam Kontestasi Politik di Kabupaten Polewali Mandar)," *Tesis* (Makasar: Pascasarjana UIN Alauddin Makasar, 2020).

lazim dan biasa saja. Dampak politik ulama makin nyata ketika ulama dimanfaatkan sebagai perantara dalam proses pencalonan kepala daerah baik pada pemilihan gubernur maupun pejabat. Sedangkan dampak ulama dalam melakukan strategi pengungkapan di Polman masih belum ideal. Ulama hanya terlibat dalam melakukan pendekatan pemerintah terkait dengan permasalahan yang ketat. Dalam pendekatan yang lebih luas, ulama masih belum dilibatkan oleh otoritas publik, baik yang utama maupun yang berwenang, dengan alasan mereka masih dipandang belum mempunyai kemampuan di bidang tersebut. Reaksi para pionir daerah terhadap kiprah politik ulama dalam kontestasi politik di Polman pada dasarnya sangat bersyukur, namun diakui kiprah dan pengaruh ulama di Polman masih belum maksimal. Oleh karena itu, semua pihak berkeinginan untuk memperkuat kiprah ulama di ranah legislasi di Polman dengan memberdayakan ulama yang mempunyai batas dan kehormatan agar dapat terlibat secara efektif dalam kontestasi politik di Polman dan memberikan dampak dalam pengambilan pendekatan terbuka di Polman.

Kelima, *Relasi Agama dan Negara: Perspektif Pemikiran Islam*, jurnal IAIN Manado tahun 2017, oleh Edi Gunawan.¹² Jurnal ini menganalisis hubungan antara agama dan negara menurut sudut pandang pemikiran Islam. Kajian ini bermaksud menggambarkan hubungan antara agama dan negara dalam pandangan Islam. Teknik yang digunakan untuk memperoleh informasi adalah strategi tersendiri melalui studi menulis. Konsekuensi dari tinjauan tersebut menunjukkan bahwa di

¹²Edi Gunawan, "Relasi Agama dan Negara : Perspektif Pemikiran Islam," *Jurnal IAIN Manado*, 2017.

kalangan tokoh atau cendekiawan Islam, misalnya, Nurcholish Madjid dan Abdur Rahman Wahid sepakat bahwa ada hubungan yang bermanfaat antara dua hal, khususnya negara dan agama. Beberapa petunjuknya adalah: (1) Islam memberikan standar bagi pembangunan negara dengan gagasan khalifah, dawlah, atau hukūmah, (2) Islam menggarisbawahi nilai-nilai aturan mayoritas, yaitu kebenaran dan keadilan, dan (3) Islam menjaga kebebasan dasar. (HAM) dengan memverifikasi bahwa hak esensial yang dibawa ke dunia adalah hak atas kesempatan beragama. Selanjutnya, Islam pada dasarnya menekankan pentingnya menjaga kebebasan bersama di suatu negara, karena kebebasan bersama adalah kebebasan yang tidak boleh dilanggar atau dicabut dari individu yang memiliki hak istimewa tersebut.

Keenam, *Agama dan Politik di Kalimantan Selatan*. Tulisan dari seorang Dosen Fakultas Ushuluddin Dan Humaniora IAIN Antasari tahun 2016, Mirhan AM¹³. Pemaparan jurnal ini menunjukkan bahwa persoalan agama dan perundang-undangan saling berkaitan. Agama merupakan sesuatu yang vital untuk memberikan keaslian pada isu kekuasaan atau politik. Begitu pula di Kalimantan Selatan, sejak zaman Kerajaan Banjar, seorang penguasa telah melibatkan agama sebagai pandangan dan pedoman dalam menjalankan kekuasaan publik. Di pemerintahan, ulama berperan penting sebagai pionir non-formal yang memberikan nasihat dan fatwa. Bahkan dalam peristiwa politik, misalnya pemilu lokal di tingkat nasional atau daerah, penyempurnaan yang tegas juga menjadi semboyan misi politik. Yang utama adalah bagaimana agama benar-benar membantu otoritas

¹³Mirhan AM, "Agama dan Politik di Kalimantan Selatan," *Jurnal IAIN Antasari Banjarmasin*, 2016.

publik dan masyarakat dalam menjalankan aktivitas politik dan sosial, bukan sekadar meraih kekuasaan.

Ketujuh, *Kiai dan Politik: Mengintip Motif Kiai NU (Nahdatul Ulama) Dalam Pemilu 2009 Di Glenmore Kabupaten Banyuwangi*, jurnal FKIP Universitas PGRI banyuwangi tahun 2016, Oleh H. Saidi.¹⁴ Kontribusi kiai dalam permasalahan legislasi Indonesia merupakan bagian tak terpisahkan dari sejarah politik Indonesia. Jadi bukan hal yang biasa jika posisi yang sangat penting ini menjadi alasan untuk memperkuat keaslian dan kiprah kiai di mata publik. Kerja sama melalui jalur-jalur yang langsung berhubungan dengan masyarakat ini menyebabkan kiai mempunyai pengikut yang setia, dan dalam posisi inilah kiai tentu dapat memanfaatkannya untuk membantu latihan sosial dan politiknya. Tugas sosio-politik kiai makin meluas ketika kiai dan sekolah pengalaman hidup Islam diatur dalam Majelis Nahdlatul Ulama. Hubungan bermanfaat yang selaras ini ditunjukkan dengan persyaratan Kiai terhadap Nahdlatul Ulama dan kebutuhan Persatuan Nahdlatul Ulama terhadap persyaratan kiai, sehingga kiai dan Persatuan Nahdlatul Ulama merupakan dua bagian yang tidak dapat dipisahkan. Seberapa besar modal persahabatan yang dimiliki seorang kiai di mata masyarakat tidak membebaskan kiai dari tuduhan yang mempertanyakan kapasitas kiai dalam urusan pemerintahan. Kontribusi kiai dalam persoalan-persoalan fungsional pemerintahan, seperti sudah lama terjadi bolak-balik antara kelompok yang mendukung kontribusi kiai dalam persoalan legislasi dan perkumpulan yang jelas-jelas menentang keikutsertaan kiai

¹⁴H Saidi, "Kiai Dan Politik : Mengintip Motif Kiai NU (Nahdatul Ulama) Dalam Pemilu 2009 Di Glenmore Kabupaten Banyuwangi," *Jurnal FKIP Universitas PGRI Banyuwangi*, tahun 2016.

dalam persoalan legislasi. Sementara itu, majelis berikutnya dengan tegas menegur hal tersebut, dengan anggapan bahwa keikutsertaan kiai dalam urusan pemerintahan lebih banyak membawa kerugian dibandingkan keuntungan. Meski telah banyak dibicarakan mengenai kontribusi kiai dalam isu-isu pemerintahan, nyatanya kontribusi kiai dan sekolah pengalaman hidup Islam tidak bisa diabaikan. Kekuasaan kiai dan jenis kontribusi kiai dalam permasalahan legislasi dapat berfluktuasi, baik secara lugas maupun tidak langsung, sebagaimana terlihat dari kontribusi kiai dalam momen-momen politik yang signifikan seperti pemilu, pemilu, dan pemilu resmi. pemilihan presiden), atau keputusan umum untuk kepala. Daya tarik lokal (Pemilukada) dalam kerangka politik liberal yang dianut di Indonesia merupakan sebuah medan ujian yang sulit bagi kiai. Hal ini berkaitan dengan persoalan pemerintahan liberal, maka organisasi politik tidak dapat dibedakan hanya berdasarkan pandangan ketatnya saja, karena juga terkait dengan antisipasi kepentingan moneter. Fatwa-fatwa dan terjemahan para kiai pada umumnya tidak didasarkan pada pemahaman ulama masa lalu yang dapat dijadikan sebagai sumber perspektif individu dalam menentukan wataknya, namun lebih didorong oleh maksud perhitungan politik sebagai ciri permasalahan perundang-undangan. pertukaran sapi. Beragamnya cara pandang politik kiai menunjukkan bahwa kontribusi kiai dalam persoalan legislasi didorong oleh proses berpikir yang berbeda-beda. Mencoba memahami proses berpikir perkumpulan kiai dalam isu-isu pemerintahan tentu bukan perkara mudah. Ali Maschan Moesa menawarkan pandangan yang hampir serupa, memberikan tipologi pada kiai tarekat yang juga dilandasi oleh perkembangan kiai dalam mengartikan Patriotisme, antara lain kiai

Fundamentalis, kiai Moderat, dan kiai akal sehat. Berkaitan dengan kajian pada Pilpres 2009, di Daerah Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, kiprah politik kiai juga tidak bisa dibedakan dengan isu-isu yang mengingat kiprah politik kiai untuk persoalan legislasi, termasuk yang mengingat proses pemikiran dibalik kontribusi kiai terhadap persoalan pemerintahan. Di Kawasan Glenmore Kabupaten Banyuwangi, keikutsertaan Kiai dalam urusan pemerintahan merupakan sesuatu yang lumrah.

Kedelapan, *Posisi Ulama dalam Pemerintahan Kota Padangsidempuan*, jurnal IAIN Padangsidempuan, oleh Sholeh Fikri, tahun 2016.¹⁵ Kajian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai kedudukan ulama dalam pemerintahan di Kota Padangsidempuan. Mengingat kedudukan ulama merupakan tempat yang patut diperhatikan oleh kalangan pemerintah sebagai ciri komponen masyarakat yang mempunyai potensi yang tidak tergerak oleh oknum-oknum biasa dan ulama merupakan kaki tangan kekuasaan publik. Kajian ini merupakan eksplorasi grafis subjektif dengan informasi yang diperoleh melalui persepsi dan pertemuan dengan ulama Islam dan kalangan terpelajar di Kota Padangsidempuan. Konsekuensi dari penelusuran ditemukan bahwa gaya otoritas publik Kota Padangsidempuan kurang mempertimbangkan latihan ketat, kecuali latihan rutin seperti MTQ, dan latihan selama periode Ramadan. Latihan bantuan pemerintah kepada masyarakat belum terlihat. Pertimbangan otoritas publik terhadap kawasan instruksi yang merupakan gambaran kota Padangsidempuan pun luput. Tugas ulama

¹⁵Sholeh Fikri, "Posisi Ulama dalam Pemerintahan Kota Padangsidempuan," *Jurnal IAIN Padangsidempuan*, tahun 2016.

juga tidak banyak memberikan kontribusi terhadap kemajuan, komunikasi yang ada merupakan komunikasi satu arah tanpa menimbulkan kebutuhan bersama. Karena tugas ulama masih kecil, maka ulama belum bisa memberikan nada keulamaan kepada otoritas publik. Otoritas publik menciptakan jarak tertentu dari ulama. Otoritas publik melakukan pendekatan terhadap ulama pada waktu-waktu tertentu, dan yang mengejutkan, pada saat para ulama tersebut memengaruhi masyarakat. Saluran surat menyurat di kalangan ulama dan masyarakat masih bersifat adat dan belum memiliki struktur yang mutakhir dan tepat, seperti banyak hal yang tidak dapat dimanfaatkan oleh otoritas publik. Pada akhirnya, hanya sedikit lembaga legislatif yang memberikan hibah kepada ulama karena rendahnya komitmen ulama terhadap otoritas publik.

Kesembilan, *Ulama dan Politik: Analisis Fatwa dan Peran Politik Majelis Ulama Indonesia (MUI) Era Reformasi*, Tesis oleh Ahmad Fajri 2014.¹⁶ Tesis ini menunjukkan bahwa pola substansial yang dilakukan para ulama di awal Orde Baru cenderung berubah ke arah politik, bahkan pragmatis di era reformasi. Selain itu, tesis ini juga menunjukkan bahwa pola Substansialisme justru lebih positif di kalangan ulama dan umat Islam dibandingkan dengan upaya politisasi, di mana pembekuan politik terbukti lebih cair, bahkan sikap penguasa lebih akomodatif terhadap Islam. Pola ini sepertinya sesuai dengan kaidah Ushul Fiqh; *Daf'u Al-Mafasid Muqaddam 'Ala Jalb Al-Mashalih* (menghindari kerugian didahulukan dari keuntungan). bahwa menghindari kekacauan politik harus diutamakan karena

¹⁶Ahmad Fajri, "Ulama Dan Politik : Analisis Fatwa Dan Peran Politik Majelis Ulama Indonesia (MUI) Era Reformasi", *Tesis* (Jakarta: Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2014).

mencerminkan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, substansi Islam harus dikedepankan agar menjadi faktor penentu terbentuknya budaya politik itu sendiri. Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dalam hal ini kerap dianggap sebagai satu-satunya ormas yang memberikan jaringan kelembagaan ulama dan intelektual yang solid di era Orde Baru (khususnya periode awal), dinilai banyak pihak turut berperan. sebuah peran. Saat itu, MUI terlihat jauh di bawah kekuasaan rezim. yang berkuasa; seringkali terkooptasi oleh kepentingan kekuasaan, sehingga dianggap tak lebih dari sekadar “terompet” bagi penguasa dalam hal legitimasi produk kebijakan. Namun kenyataannya justru melalui pola substansialis yang diterapkan oleh Ulama (MUI) pada awal Orde Baru es politik yang ada mampu mencair; Terlihat pada akhir kekuasaan rezim, negara (pemerintah) tampak lebih akomodatif terhadap berbagai kepentingan Islam. Sementara itu, di era reformasi, situasi sosial politik dan euforia budaya reformasi saat ini nampaknya menyebabkan MUI mengalami variasi dalam diferensiasi fatwa dan peran politik; Hal ini terlihat ketika MUI membahas berbagai persoalan terkait politik; Keluarnya fatwa pelarangan pelaksanaan hak pilih, misalnya dalam hal ini kepemimpinan dalam Islam, serta mengenai praktik demokrasi di Indonesia, rupanya memunculkan kontroversi dan polemik baru di masyarakat, serta menimbulkan berbagai permasalahan. kontroversi di kalangan masyarakat. opini, terutama dari sudut pandang objektivitas. Pergeseran istilah ungkapan orientasi itu sendiri sengaja dilakukan, karena secara substansi orientasi politik MUI tidak mengalami perubahan, artinya masih bertumpu pada orientasi politik nasional (*high politic*), seperti yang terlihat pada Musyawarah Nasional maupun dalam berbagai acara. Musyawarah Ijtima

Ulama misalnya MUI terus memikirkan berbagai isu strategis. kewarganegaraan, yaitu dengan tetap memberikan rekomendasi dan/atau memberikan nasihat bagaimana menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, misalnya selain ikut serta kita juga turut serta merumuskan konsep bangsa dan negara yang patriotik.

Kesepuluh, *Peranan Ulama di dalam Membina Masyarakat Banjar Di Kalimantan Selatan*. Tulisan dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari tahun 2012, Ahdi Makmur.¹⁷ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran ulama dalam kemajuan kelompok masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Para ahli berpendapat, para ulama menganggapnya sebagai bagian dari adat, padahal mereka hidup pada zaman modern. Apa pun tipologinya, para ulama telah menyatakan solidaritasnya terhadap masyarakat Banjar. Ulama mempunyai peranan penting dalam menumbuhkan keseimbangan dan keselarasan serta solidaritas berbagai pandangan, kepentingan dan pertemuan di Banjar. Penelitian tersebut juga menilai bahwa segmen dan elemen sosial tidak memiliki wilayah kekuatan bagi mereka yang berprofesi sebagai ulama, selain faktor legalisme. Dalam masyarakat Banjar, ulama mempunyai kedudukan yang tinggi karena menurut siapa pun akhlaknya terpuji, pengabdianya dan karya besarnya dalam membangun masyarakat. Selain itu, karena legalismenya, penilaian para ulama terhadap perubahan sosial, modernisasi dan perbaikan di Kalsel dijawab tegas oleh daerah setempat.

¹⁷Ahdi Makmur, "Peranan Ulama Di Dalam Membina Masyarakat Banjar Di Kalimantan Selatan," *Jurnal IAIN Antasari*, tahun 2012.

Kesebelas, *Islam Di Kalimantan Selatan dilihat dari Perspektif Politik dan Pemerintahan*. Tulisan dosen dari fakultas syari'ah IAIN Antasari tahun 2009, Nurwahidah.¹⁸ Tulisan ini menjelaskan ciri politik dan pemerintahan pada kerajaan banjar, yaitu kekuasaan penuh penghormatan terhadap umat Islam, sehingga kekuatan yang ada di dalamnya raja banjar, Islam dapat dilaksanakan secara penuh setelah waktu itu Umat Islam memang tidak memiliki peta politik karena pada saat itu Yang berkuasa adalah rakyat kolonial, yaitu Belanda dan Jepang pasca kemerdekaan tahun 1945 hiptah umat Islam pada Dunia politik di Kalsel tersalurkan ke partai-partai Islam, yang pada pemilu tahun 1955 dimenangkan oleh Nahdatui Uiana dan Masyumi, sedangkan pada pemilihan selanjutnya yaitu Pada Tahun 1971,1977,1982,1987,1992 dan 1997 hasil diwakili oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), khususnya selama ini 1987 berangsur-angsur menurun, oleh karena itu diasumsikan jatuh tempo Umat Islam tidak peduli dengan pentingnya pembangunan politik perkembangan Islam dan minimnya tokoh-tokoh aspiratif yang mengontrolnya terhadap kebutuhan tjil umat Islam dan rendahnya komitmen terhadap meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Keduabelas, *Peran Tuan Guru Dalam Peta Politik Lokal*. Tulisan mukhtar sarman seorang ketua program magister sains administrasi pembangunan, Universitas Lambung Mangkurat.¹⁹ Penelitian yang memahami sebagian besar peraturan pemerintah umumnya akan mencakup standar. Dalam kisruh tersebut, perlu diketahui kualitas bentrokan yang terjadi. Untuk menghindari kesulitan

¹⁸Nurwahidah, "Islam Di Kalimantan Selatan Di Lihat Dari Perspektif Politik Dan Pemerintahan," *Jurnal IAIN Antasari*, tahun 2009.

¹⁹Mukhtar Sarman, "Peran Tuan Guru Dalam Peta Politik Lokal," *Jurnal Universitas Lambung Mangkurat*.

tersebut, ada pengaturan yang cukup sederhana yang diketahui dengan mengacu pada peraturan pemerintah. Dengan cara ini, pertemuan-pertemuan yang terkait dengan tantangan ini juga tidak memenuhi standar hukum. Legalisme menjadi alasan aktivitas ketika sistem kekuasaan mayoritas terjebak dalam kontestasi standar. Orang-orang biasa yang kehilangan panutan yang baik tidak akan pernah bisa lagi bergantung pada keamanan etis mereka. Apalagi jika contoh yang baik itu sendiri berencana untuk berusaha meraih kemenangan dalam pertandingan yang berkelanjutan. Selain itu, para manajer kelompok ideologi yang penting bagi kelas satu, karena kontestasi langsung dari ras politik provinsi, menunjukkan kualitas yang lebih khusus yang membuat kesepakatan politik dengan penghibur yang diharapkan. Elite moneter di lingkungan sekitar umumnya akan mengikuti para spesialis demi keuntungan finansial. Sementara itu, para elite tradisional, khususnya Tuan guru, terkadang tampak ragu-ragu untuk menampilkan dirinya sebagai "kiai politik", atau bahkan sebagai contoh yang baik bagi masyarakat yang steril dari sektarianisme politik. Kebetulan Tuan Guru pada umumnya tidak mampu menunjukkan kejujuran individu untuk menunjukkan kewajaran informasi mereka yang teliti dalam menanggapi masalah-masalah aneh dalam praksis kekuasaan mayoritas politik yang memicu sudut pandang obsesif.

F. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, beberapa konsep akan didefinisikan secara operasional sebagai berikut:

1. Ulama:

Dalam penelitian ini ulama yang dimaksud adalah, tokoh agama di masyarakat, diakui oleh masyarakat bahwa orang yang disebut dengan ulama itu memiliki pengetahuan yang luas mengenai aspek keagamaan, dibuktikan dengan memiliki majelis ta'lim atau tempat pembelajaran bagi masyarakat.

2. Kontestasi Politik:

Dalam penelitian ini konteks kontestasi politik adalah ulama yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif di Kabupaten Banjar pada saat pemilu 2024. Dalam konteks politik praktis, kontestasi politik menjadi alat utama untuk memperjuangkan kepentingan politik, mengelola konflik, dan mencapai tujuan politik dari berbagai aktor yang terlibat dalam proses politik sehari-hari.

3. Kabupaten Banjar:

Kabupaten Banjar adalah salah satu kabupaten yang ada di Kalimantan selatan, yang pusatnya berada di kota Martapura, terdiri dari 20 kecamatan. Dalam penelitian ini hanya berada di lokasi satu kecamatan saja, yaitu Kecamatan Martapura, tepatnya di dua tempat, Sungai Sipai dan Cindai Alus.

4. Wacana keagamaan

Wacana keagamaan adalah serangkaian pernyataan, teks, dan praktik yang berkaitan dengan ajaran dan nilai-nilai agama, yang digunakan oleh pemuka agama dan lembaga keagamaan untuk membentuk pemahaman, sikap, dan perilaku masyarakat. Komponen utama wacana keagamaan meliputi khotbah dan ceramah yang disampaikan di tempat ibadah, teks suci seperti Al-Quran dan Hadis, literatur keagamaan berupa

buku dan artikel, serta ritual keagamaan seperti sholat dan puasa. Saluran komunikasi yang digunakan mencakup tempat ibadah, media massa seperti televisi dan radio, serta media digital seperti website dan media sosial.²⁰ Produksi dan penyebaran wacana ini dilakukan oleh pemuka agama dan lembaga keagamaan yang memiliki otoritas dalam komunitas. Dalam penelitian mengenai "Ulama sebagai Kontestan Politik Tahun 2024 di Kabupaten Banjar: Analisis Wacana Keagamaan Michel Foucault," wacana keagamaan dianalisis melalui khotbah, ceramah maupun penyampaian terhadap masyarakat, tulisan dan publikasi mereka, peran dalam ritual dan kegiatan sosial keagamaan, serta penggunaan media untuk menyebarkan ajaran agama. Fokus penelitian adalah memahami bagaimana ulama membentuk dan memanfaatkan wacana keagamaan untuk mempengaruhi pemahaman, sikap, dan perilaku politik masyarakat, serta bagaimana masyarakat menerima dan merespons wacana tersebut dalam konteks politik lokal.²¹

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan mengacu pada struktur dan tata cara penyusunan sebuah karya tulis, seperti skripsi, yang dirancang untuk memberikan kerangka kerja yang jelas dan teratur bagi pembaca. Tujuannya adalah memudahkan pemahaman, mengikuti alur logis, dan memperkuat keberlanjutan argumen atau

²⁰Michel Foucault, *Wacana Kuasa/Pengetahuan*, 122.

²¹Umar Kamahi, "Teori Relasi Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik", *Jurnal Al-Kitabah*, Vol.III, No.1, 2017, 118.

analisis. Berikut penjelasan lebih mendalam mengenai unsur-unsur dalam sistematika penulisan skripsi:

1. Bab I: Pendahuluan

Bab ini memperkenalkan konteks politik di Kabupaten Banjar pada tahun 2024 serta fenomena ulama yang terlibat sebagai kontestan politik. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana ulama menggunakan wacana keagamaan dalam kampanye politik mereka, dengan memanfaatkan pendekatan analisis wacana Michel Foucault. Latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan kerangka teori termasuk konsep wacana keagamaan dan teori Foucault menjadi pokok pembahasan utama dalam bab ini.

Tentunya! Berikut adalah deskripsi singkat untuk Bab 2 hingga Bab 5:

2. Bab II: Landasan Teori

Bab ini mengulas konsep ulama dalam politik dengan meninjau literatur terkait dari perspektif historis dan kontemporer. Selain itu, bab ini menjelaskan teori-teori yang relevan tentang wacana keagamaan dan pendekatan Michel Foucault dalam analisisnya. Diskusi juga mencakup posisi ulama dalam masyarakat dan politik lokal, serta pengaruh mereka dalam pengambilan keputusan politik.

3. Bab III: Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan pendekatan penelitian filosofis yang digunakan untuk mengeksplorasi fenomena ulama sebagai kontestan politik di Kabupaten Banjar. Desain penelitian, termasuk pemilihan lokasi penelitian

dan teknik pengumpulan data seperti wawancara mendalam dengan ulama serta analisis dokumen kampanye, diuraikan dengan jelas. Teknik analisis data yang digunakan, khususnya analisis wacana Foucauldian, juga diperkenalkan dalam bab ini.

4. Bab IV: Hasil Penelitian

Bab ini menyajikan profil ulama yang terlibat sebagai kontestan politik serta hasil dari analisis wacana keagamaan menurut pendekatan Michel Foucault. Temuan dari penelitian, termasuk strategi dan pola dalam penggunaan wacana keagamaan oleh ulama, didiskusikan secara mendetail.

5. Bab V: Kesimpulan

Bab ini menafsirkan temuan utama dari penelitian dan menghubungkannya kembali ke literatur yang relevan. Implikasi hasil penelitian terhadap teori, praktik politik, dan masyarakat setempat dibahas secara mendalam, sambil menyoroti keterbatasan metodologis dan memberikan saran untuk penelitian masa depan di bidang ini.

Dengan struktur ini, penulisan terorganisir dengan baik dan mengikuti alur logis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana ulama menggunakan wacana keagamaan dalam konteks politik lokal di Kabupaten Banjar.